

Optimalisasi peran pkk dalam PEMBANGUNAN MENUJU KESETARAAN gender

Disampaikan dalam *Acara Capacity Building* Tim
Penggerak PKK Kab. Malang Di UMM Dome; 25
Pebruari 2015

TENTANG PKK

1. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri;
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya;
3. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan;

4. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermartabat;
5. Program pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga;
6. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
7. Badan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah Badan Pendukung Program PKK;
8. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan;
9. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang terdiri dari 10-20 kepala keluarga, diketuai oleh salah seorang ketua yang dipilih, sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK

TUJUAN PKK

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa



SASARAN

Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya dalam bidang:

1. Mental spiritual, meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara dinamis dan bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Fisik material, yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan

10 PROGRAM POKOK PKK

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
2. Gotong Royong;
3. Pangan
4. Sandang;
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
6. Pendidikan dan keterampilan;
7. Kesehatan;
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
9. Pelestarian lingkungan hidup;
10. Perencanaan sehat



Membedakan Seks Atau Gender

	PERNYATAAN	S	G
01	Perempuan melahirkan bayi, laki-laki tidak		
02	Anak perempuan lembut, sedangkan anak laki2 kasar		
03	Dalam suatu studi yg melibatkan 224 kebudayaan, ada 5 golongan dimana kaum laki2 bertanggung jawab menyiapkan masakan, dan 36 golongan dimana kaum perempuan mengerjakan pembangunan rumah		
04	Hanya laki2 yang bisa terserang kanker prostat		
05	Pada zaman dahulu , ada satu daerah dimana kaum laki2 tinggal dirumah dan menenun, sedangkan perempuan bertanggung jawab terhadap semua urusan rumah tangga dan hanya perempuan yg memperoleh warisan		

12 BIDANG AGENDA GENDER

1. Perempuan dan Kemiskinan
2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan
3. Perempuan dan Kesehatan
4. Kekerasan Terhadap Perempuan
5. Perempuan dan konflik bersenjata
6. Perempuan dan Ekonomi
7. Perempuan Dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan
8. Mekanisme Institusional untuk kemajuan perempuan
9. Hak Asasi Perempuan
10. Perempuan dan Media
11. Perempuan dan Lingkungan
12. Anak Perempuan

Critical Area 1: perempuan dan kemiskinan

- Area kritis ini muncul karena didasari oleh fakta bahwa kemiskinan merupakan salah satu hambatan terbesar dalam perwujudan penuh HAM dan penghormatan atas martabat manusia.
- Pemerintah dengan didukung sejumlah pemangku kepentingan terkait telah melaksanakan sejumlah program yang juga menarget kelompok perempuan miskin. Program antara lain diarahkan untuk mengurangi kerentanan keluarga miskin dari berbagai gejolak ekonomi dan finansial, maupun mendorong adanya kemandirian ekonomi perempuan: melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan *conditional cash transfer* untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin (RTSM); Program PNPM Mandiri sebesar 20 persen diperuntukkan untuk pemberian mikro kredit bagi perempuan, hingga September 2014 tercatat sebanyak 25.062 kelompok perempuan yang menerima modal usaha simpan pinjam; Pprogram pengembangan koperasi wanita perkasa dan koperasi pedesaan serta perkotaan dengan total jumlah dana sebesar 10 Miliar

Critical Area 2:

PENDIDIKAN & PELATIHAN BAGI PEREMPUAN

Arti Pentingnya

- Alat yang penting dalam pencapaian kesetaraan, pembangunan dan perdamaian
- Pendidikan yang non diskriminatif akan bermanfaat baik bagi laki-laki dan perempuan dan pada akhirnya akan menumbuhkan hubungan yang lebih setara antara keduanya sebagai agen dan penerima manfaat pembangunan

Kemajuan

- PUG di bidang pendidikan: sosialisasi di media hingga pemberian program pendidikan berwawasan gender dan sosialisasi kepada keluarga sebagai unsur terkecil masyarakat
- Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah diterima kurang lebih 8 juta siswa SD dan 2,8 juta siswa SMP pada tahun 201

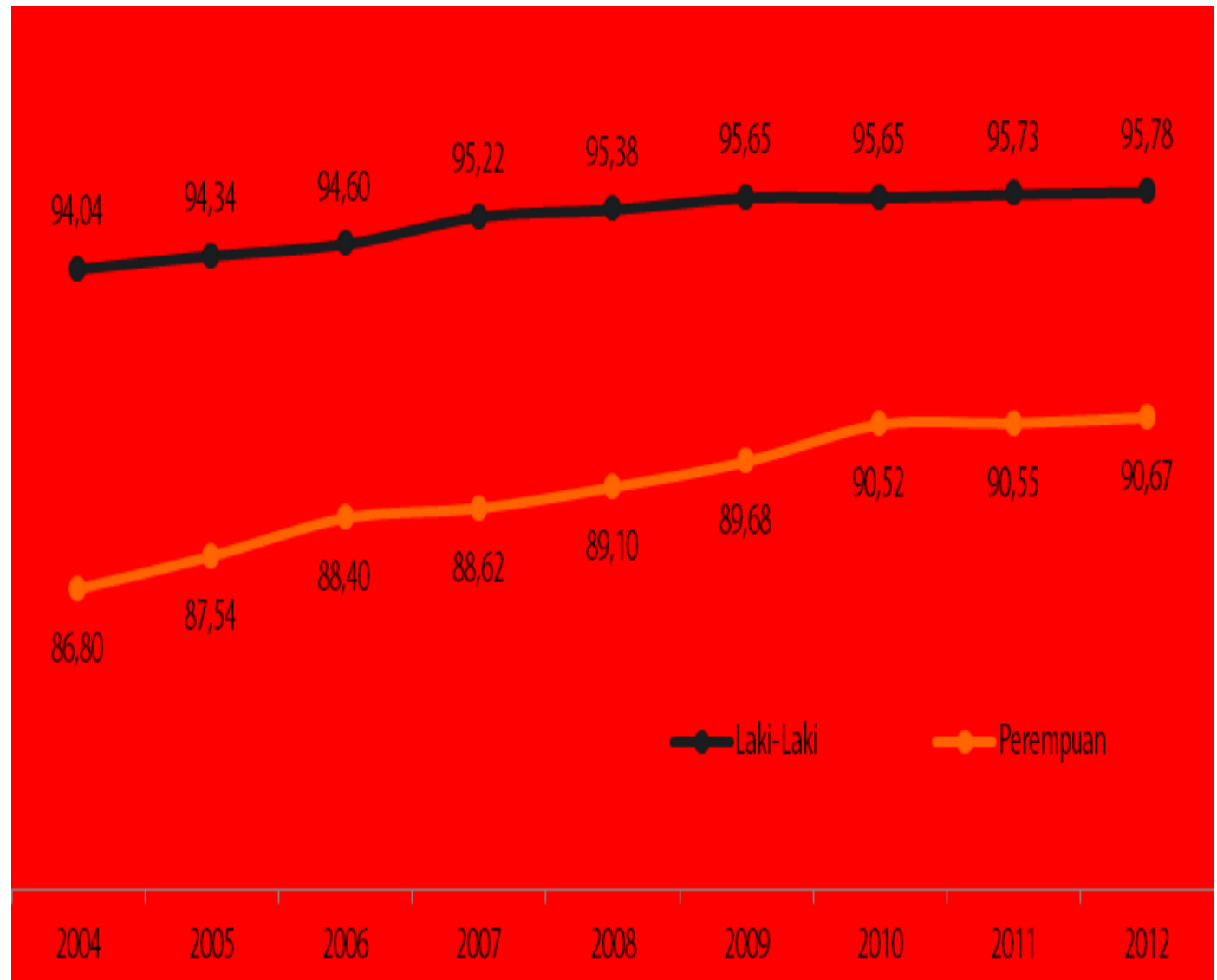
LANJUTAN...

- Investasi untuk pendidikan dan pelatihan dapat mendorong pencapaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
- Program lainnya adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah berjalan sejak tahun 2005
- kebijakan akses pendidikan bagi anak2 di pengungsian akibat bencana dan konflik.
- Program Pendidikan Keaksaraan dengan sasaran perempuan dan anak perempuan, seperti: program Koran Ibu dan Koran Anak, Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan, Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Pintar

PENDIDIKAN

Perkembangan
Angka Melek
Huruf,
2004-2012

Sumber: BPS



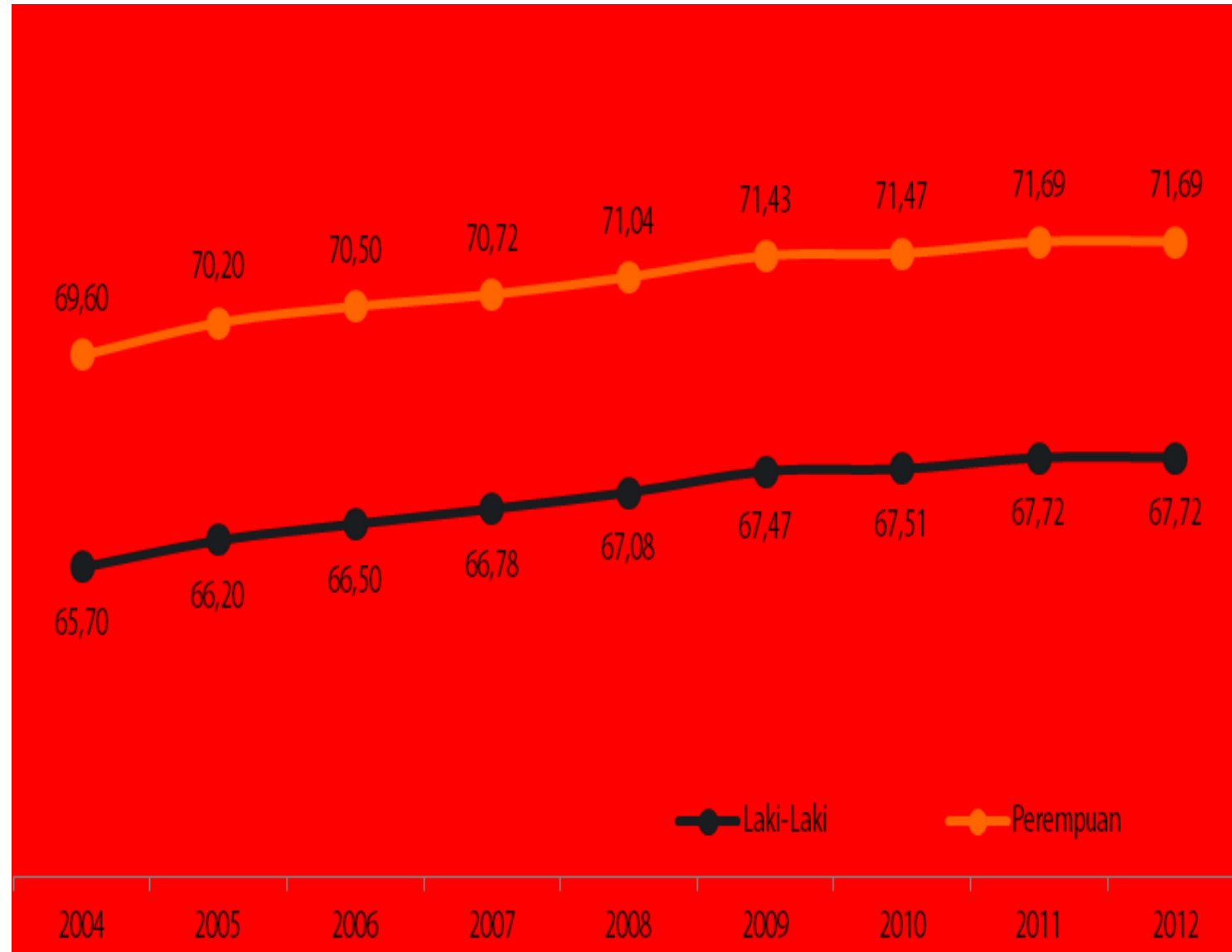
Critical Area 3: PEREMPUAN DAN KESEHATAN

- Perempuan mempunyai hak yang setara atas kesehatan (fisik & mental) untuk dapat berpartisipasi aktif di area privat dan publik. Namun demikian, kualitas kesehatan perempuan masih belum mencapai kondisi yang optimal, karena adanya ketidaksetaraan akses, baik itu antara perempuan dan laki-laki, maupun antar sesama perempuan dengan latar belakang sosial, ekonomi dan wilayah tempat tinggal yang berbeda.
- Di bidang kesehatan, meskipun telah banyak kebijakan, program maupun anggaran yang telah diterapkan dalam meningkatkan akses masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap layanan kesehatan, Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah yang cukup besar terkait upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), penanganan HIV/AIDS serta kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga
- AKI meningkat dari semula 228 per 100.000 kelahiran pada tahun 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 2012). Target AKI tahun 2015, sebesar 102 per 100.000 kelahiran.
- Kasus HIV/AIDS terus meningkat, dan Kelompok dengan resiko tertinggi untuk tertular adalah kelompok pekerja seksual dan pengguna narkoba suntik, selain itu terdapat tren peningkatan penularan virus HIV dari suami ke isteri dan bayi yang dikandung

KESEHATAN

Perkembangan
Angka
Harapan
Hidup
2004-2012

*Sumber:
BPS*



Critical Area 4: kekerasan thdp perempuan

- Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya melanggar HAM, namun juga menciptakan halangan bagi tercapainya kesetaraan gender dan pembangunan
- Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk (kekerasan fisik, seksual atau psikologis) di ruang privat maupun publik, tanpa memandang status ekonomi, kelas sosial dan latar belakang lainnya
- Meningkatnya jumlah data kasus kekerasan terhadap perempuan, bukan semata karena peningkatan tindak kekerasan di masyarakat, tetapi juga diakibatkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan perempuan atas hak mereka untuk dilindungi sehingga mereka semakin berani untuk mengungkapkan dan melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Selain itu, akses perempuan untuk melakukan pelaporan semakin mudah dengan dibentuknya sejumlah saluran pelaporan, seperti melalui Unit Perempuan dan Anak di Kepolisian, Rumah Sakit, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), *hotline* dan layanan lainnya.

Critical Area 5: PEREMPUAN & AREA KONFLIK

- Perdamaian merupakan syarat utama bagi tercapainya kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan.
- Berbagai jenis konflik, termasuk konflik bersenjata, konflik sosial yang masih terus terjadi di berbagai belahan dunia menciptakan situasi yang kondusif bagi terjadinya pelanggaran HAM dan hukum kemanusiaan.
- Sebagai kelompok yang sering termarginalkan di masyarakat dalam situasi damai, perempuan dan anak perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan meskipun mereka tidak terlibat langsung sebagai *combatant* (pihak yang bersengketa). Bahkan korban sipil perempuan dan anak perempuan seringkali melebihi jumlah korban *combatant*. Selain itu, mayoritas pengungsi dan *internally displaced persons* (IDPs) adalah perempuan, remaja dan anak-anak. Di situasi paska konflik, perempuan umumnya bertanggung jawab untuk merawat korban konflik dan menjadi kepala keluarga.

Critical Area 6: perempuan dan ekonomi

- Kesetaraan gender di bidang ekonomi diwujudkan dengan adanya keterlibatan dan partisipasi perempuan secara adil dan setara dengan laki-laki dalam pembangunan serta dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan guna memajukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
- Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2012 menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja mencapai 47,91 %. Semakin banyak perempuan yang terjun di sektor formal dan profesional, ada peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian menjadi 36,67 % pada tahun 2011
- Masih ditemukan keterbatasan bagi perempuan untuk dapat memenuhi potensi ekonomi secara maksimal akibat adanya praktek diskriminasi yang berakar dari stereotipe tradisional seperti perempuan banyak yang bekerja di sektor “feminin” dan informal dengan upah rendah maupun tanggung jawab perempuan dalam perawatan keluarga (*unpaid care work*) yang seringkali menghalangi perempuan untuk bekerja penuh waktu.

Critical Area 7: perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan

- Kesetaraan perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan telah diakui secara umum dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Partisipasi perempuan dalam pemerintah bukan hanya sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dan dapat lebih mewakili masyarakat secara berimbang, namun diharapkan dapat memperjuangkan kepentingannya
- Pada prakteknya, peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Hal ini disebabkan masih adanya budaya patriarki yang membatasi partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
- Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia, masih mengalami dinamika. Dalam pemilihan umum tahun 2014, jumlah keseluruhan calon legislatif (caleg) perempuan adalah 2.467 orang (37%), dari total 6.607 caleg. namun, keterwakilan di parlemen, hanya 17.3 %, menurun dari tahun 2009, yaitu 18.3 %.

Critical Area 8: mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan

- Institusi pemberdayaan perempuan harus dalam struktur tertinggi di jajaran pemerintahan, serta mendapatkan kesempatan dan sumber daya yang memadai untuk mengarahkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dalam seluruh lini pemerintahan. Namun, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan bahwa institusi-institusi tersebut menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, seperti ketidakjelasan mandat serta kurangnya dukungan politik dan sumber daya dari pemerintah pusat.
- Dalam mendorong perlindungan hak-hak perempuan, KPP-PA sebagai unsur eksekutif Pemkab bekerjasama dengan mitra guna fokus terhadap isu perempuan
- Salah satu capaian utama institusi-institusi pemberdayaan perempuan di Indonesia adalah terlaksananya reformasi hukum yang mendorong integrasi perspektif gender dalam perencanaan, pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dasar hukum untuk pemberdayaan perempuan dan pemenuhan kesetaraan gender telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral maupun spesifik.

Critical Area 9: perempuan dan hak azasi manusia

- Hak asasi dan kebebasan mendasar bagi perempuan dan anak perempuan merupakan syarat utama bagi terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- RANHAM telah mengintegrasikan berbagai program untuk implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Saat ini, RANHAM generasi keempat (2015-2019) sedang disusun oleh Pemerintah.

Critical Area 10: perempuan dan media

- Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak positif dan negatif bagi kaum perempuan. Di satu sisi, penyebaran informasi yang begitu cepat dan melintasi batas negara dapat merugikan perempuan melalui konten media yang melecehkan, serta pemberitaan yang tidak sensitif gender dan bersifat *stereotyping*. Di lain pihak, kemajuan TIK memudahkan perempuan dalam mengakses informasi dan berpartisipasi dalam media. Meskipun terdapat tren-tren positif, akses perempuan terhadap TIK dan keterwakilan perempuan pada kursi-kursi pengambil keputusan di sektor media masih dirasa kurang sehingga membutuhkan dukungan pemberdayaan.
- Dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam media juga meliputi dorongan bagi perempuan untuk menggeluti profesi di bidang jurnalistik. Pada tahun 2013, 28% jurnalis profesional di Indonesia adalah perempuan. Sayangnya, belum terdapat kuota khusus bagi jurnalis perempuan untuk menduduki kursi-kursi pengambil keputusan dalam sektor media, yang berimbas pada kurangnya tingkat keterwakilan jurnalis perempuan

- Peliputan media terhadap wanita juga menjadi isu yang mendapatkan perhatian dari Pemerintah RI. Meskipun peliputan wanita dalam media belum diatur secara eksplisit dalam kode etik jurnalistik, muatan media dan pemberitaan yang melecehkan atau mengeksploitasi sisi seksual wanita serta melanggar kesusilaan telah dilarang melalui UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Selain itu, KPP-PA pada tahun 2011 juga telah membuat kesepakatan bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia tentang perlindungan perempuan dan anak di bidang penyiaran. Sejak tahun 2012, Komisi Penyiaran Indonesia selalu melibatkan KPP-PA dalam penanganan kasus pelanggaran penyiaran yang melibatkan isu perempuan.

Critical Area 11: perempuan dan lingkungan

- Perlindungan lingkungan adalah elemen penting dari pembangunan berkelanjutan, dimana untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan terdapat kebutuhan untuk melestarikan alam dan isinya. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, peran manusia ditempatkan di pusatnya. Terkait hal ini, keterlibatan dan kerjasama antara seluruh elemen masyarakat, khususnya perempuan, perlu untuk terus ditingkatkan.
- Dalam setiap perumusan kebijakan dan program lingkungan, identifikasi kebutuhan gender yang berbeda harus dilakukan mengingat laki-laki dan perempuan dapat memiliki pengalaman yang khusus terkait lingkungan maupun kerentanan yang berbeda terhadap gangguan lingkungan dikarenakan peran dan fungsi sosialnya yang berbeda pula.
- Di sisi lain, perempuan tidak boleh hanya dilihat sebagai korban yang rentan terhadap gangguan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan perlu memiliki peran dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Critical Area 12: anak perempuan

- Perlindungan terhadap anak perempuan telah dimandatkan dalam berbagai instrumen HAM internasional karena Anak perempuan sangat rentan terhadap segala bentuk tindakan diskriminasi dan kekerasan sejak lahir maupun dalam tahap tumbuh kembangnya
- Hak atas identitas anak telah dimandatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti identitas kelahiran (akte) yang sangat penting untuk menjamin hak anak di masa depan
- Pengetahuan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, terutama pengembangan pola pikir. Indonesia telah memasukkan kurikulum gender di tingkat SD sampai SMA. Kurikulum ini mencakup peran perempuan dalam masyarakat, dan kekerasan terhadap perempuan yang dimainstream dalam berbagai mata pelajaran sebagai bagian dari pembelajaran yang responsif gender
- Kekerasan terhadap anak termasuk anak perempuan yaitu masalah pekerja anak dan eksploitasi seksual terhadap anak masih sangat tinggi, hingga 2013, adai 1.76 juta pekerja anak di Indonesia, 20.7 persen diantaranya bekerja di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Pemerintah telah melakukan langkah mengatasi masalah pekerja anak dengan UU No. 13 Tahun 2003, RAN Penghapusan Bentuk-Pekerjaan Terburuk Anak (2013-2022) maupun RAN Pencegahan dan Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak (2009-2014) meluncurkan Program “Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022”

MDGs to SDGs


2000 – 2015 dilanjutkan 2015 - 2030



**Jumlah Penduduk Indonesia: 237,55 juta jiwa →
49,70% (118 juta jiwa) Perempuan, dan
Laki-laki 50,30% (119,55 juta jiwa)**



Perempuan dan Anak : 70%

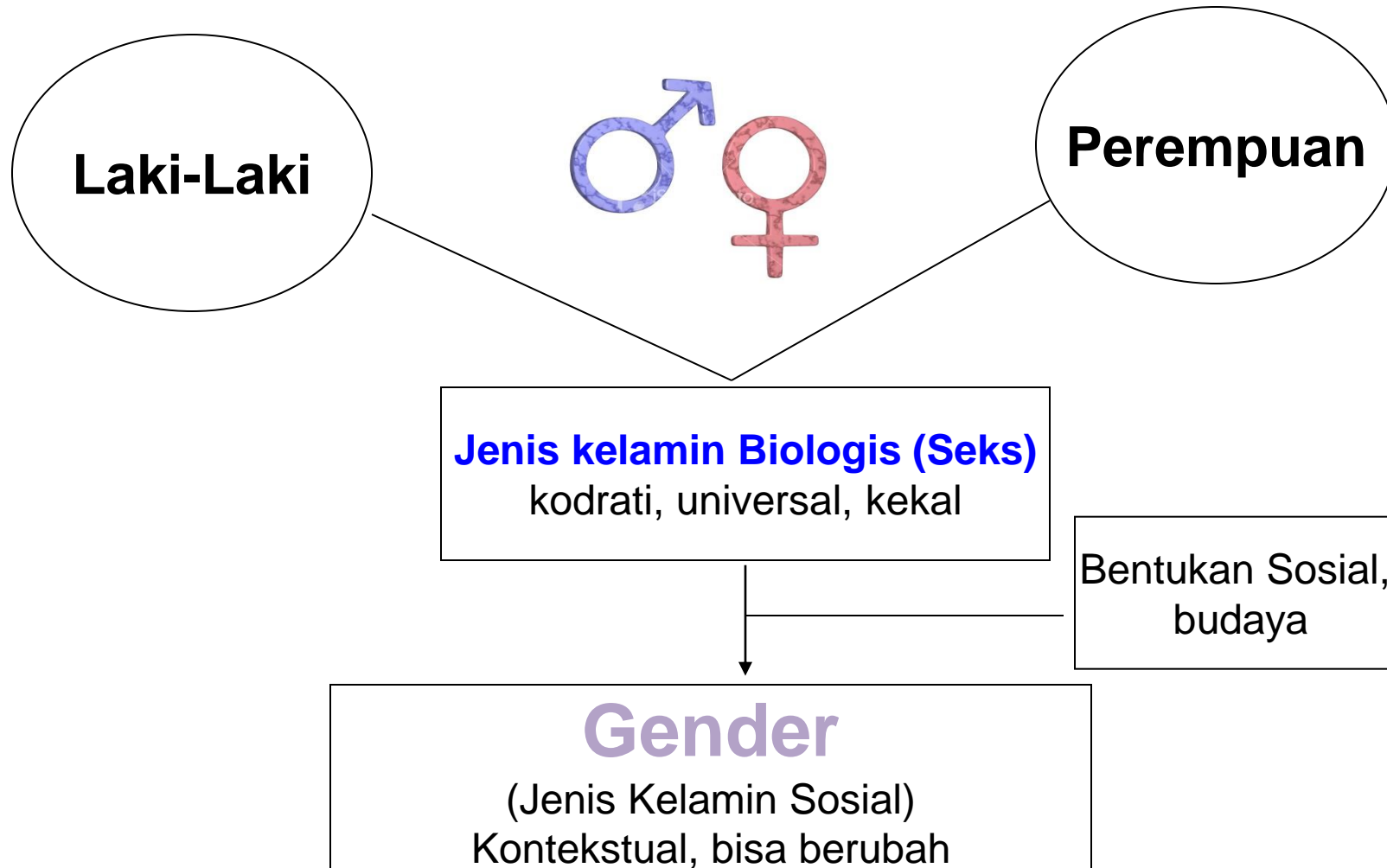


Bagian yang harus menjadi perhatian dalam perkembangan dan kemajuan Indonesia

Perempuan merupakan investasi, aset dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara

Konsep Gender

Gender sebagai Jenis Kelamin Sosial

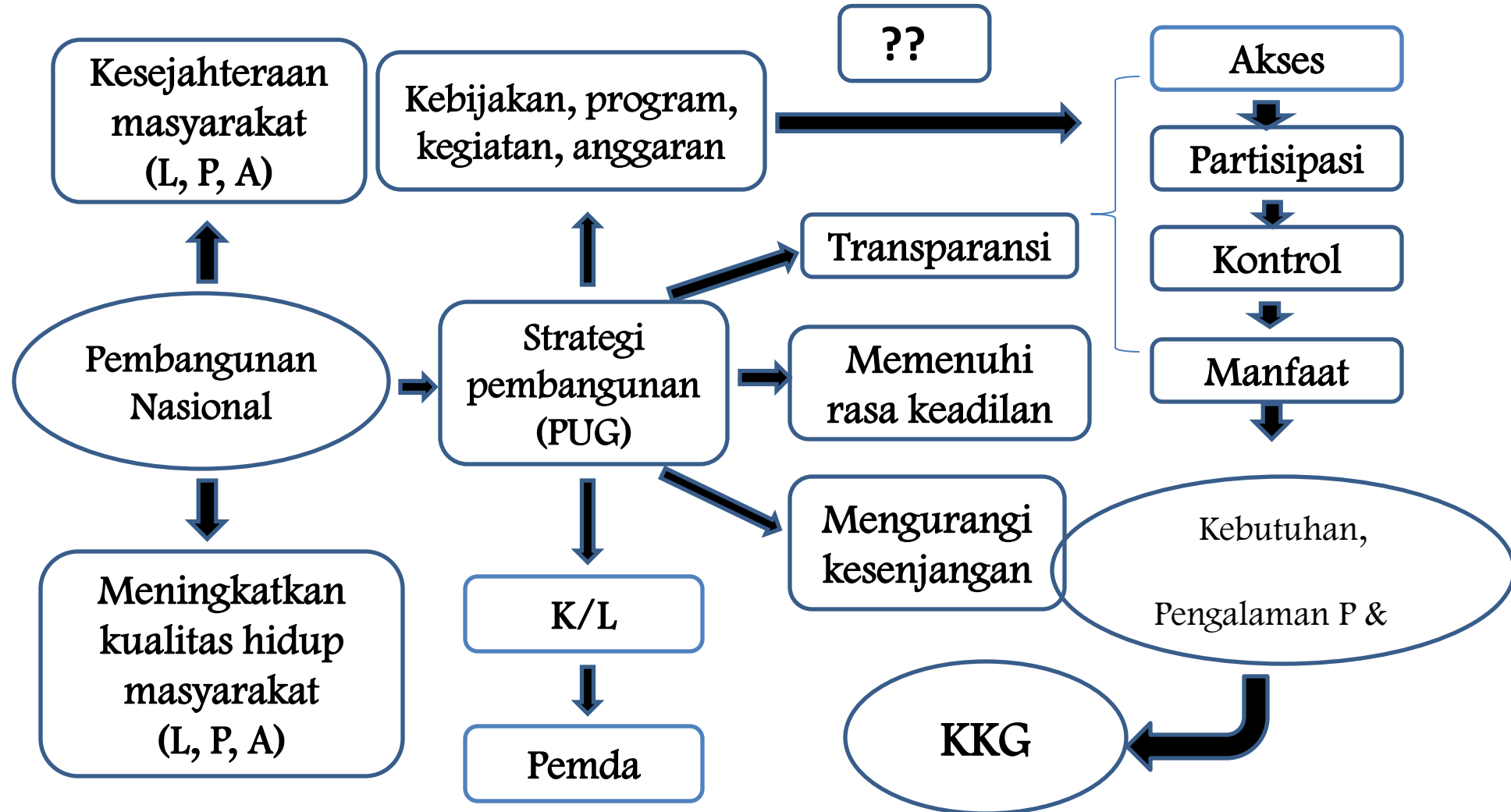


Peningkatan peran dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, khususnya kesempatan ekonomi bagi perempuan baik dalam memperoleh pekerjaan, akses finansial dan sumber daya produktif, maupun dalam konteks migrasi

Peningkatan kemampuan ekonomi perempuan telah terbukti berdampak positif bagi kesejahteraan keluarganya dan komunitasnya

Kondisi tersebut dapat memberikan *multiplier effect* pada pengembangan kapasitas perempuan di bidang-bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan politik

bagaimana PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER



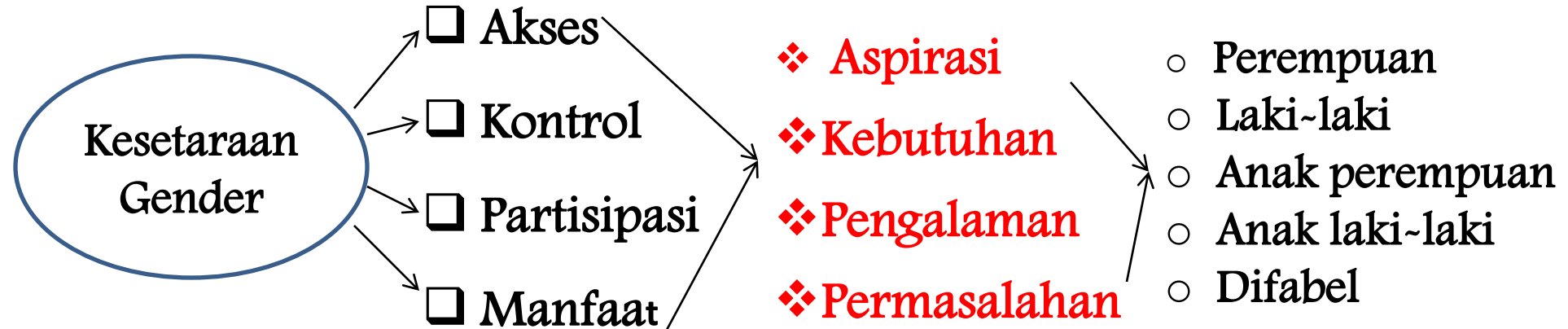
APA PENGARUSUTAMAAN GENDER ?

Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui ***perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi*** seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah

KENAPA KESETARAAN GENDER MENJADI PERHATIAN?

- Peran dan relasi gender menimbulkan ketidak-adilan dalam memperoleh manfaat dari pembangunan;
- Hasil pembangunan diterima secara tidak sama, tidak adil oleh laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan *difabel* sehingga menyebabkan ketimpangan dalam kemajuan dan banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik.

KESETARAAN GENDER



Pengintegrasian Gender dlm Pembangunan

